

PETA KESADARAN POLITIK PARA SANTRI DI PESANTREN KABUPATEN BANDUNG MENJELANG PEMILU 2004

Atie Rachmiatione^{*}, Asep Ahmad Sidik^{**}, dan Farihat Kamil^{***}

Abstrak

Penelitian ini berjudul :” Peta Kesadaran dan Pemahaman Politik para Santri di Kabupaten Bandung menjelang Pemilu Tahun 2004”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kali penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai tahun 1971, 1977, sampai dengan pemilu tahun 2004, umat Islam di Indonesia terutama dari kalangan non elit (grass root) umumnya hanya menjadi obyek atau sasaran kampanye partai-partai politik untuk meraih dukungan. Namun setelah pemilu berlangsung dan partai yang dipilih umat Islam menang; mereka diabaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor internal umat Islam sendiri atau faktor-faktor eksternal yang relatif merugikan umat Islam dalam kehidupan bernegara.

TAP MPR RI nomor XVII/MPR/1998 mengemukakan bahwa sebagai warga negara di antaranya memperoleh hak keadilan, hak kemerdekaan, hak mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi (right to know), hak kesejahteraan dan pelayanan publik dari pemerintah. Aturan dan perundangan bahkan kebijakan pemerintah tentang kehidupan politik dan kewarganegaraan (Civic Society) memang sudah sering disosialisasikan melalui media massa atau komunikasi tatap muka. Namun apakah pesan-pesan politik ini telah sampai dan dipahami juga oleh para kalangan pesantren? Pemahaman ini penting dimiliki para santri, agar tidak terjebak dalam arus permainan politik yang merugikan.

Penelitian dengan menggunakan metode survey ini menghimpun data dari 2 pesantren besar di Kabupaten Bandung dan melibatkan 88 santri sebagai responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa :

^{*} **Dr. Hj. Atie Rachmiatione, Dra., M.Si.**, adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

^{**} **Asep Ahmad Sidik, Drs.**, adalah dosen tetap Fakultas Dakwah Unisba

^{***} **Farihat Kamil, Dra.**, adalah dosen tetap Fakultas Dakwah Unisba

Pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik ada pada kategori sedang dan rendah, dalam arti mereka memahami sebatas aturan dan kebijakan pemerintah yang aplikatif berkaitan dengan dirinya sebagai anggota masyarakat dan umat Islam. Pengetahuan dan pemahaman tentang per-politik-an yang dimiliki para santri ternyata informasi politik yang sering dimunculkan oleh media massa.

Pemahaman para santri tentang statusnya sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang bukan negara Islam; cukup mantap dan tidak menganggap ada hal yang kontroversial; artinya pemahaman ajaran agama Islam digabungkan dengan pemahaman tentang peraturan negara; yang keduanya bersifat 'terbuka' dalam penafsiran dan pelaksanaan.

Kepercayaan, nilai, dan harapan para santri tentang politik (kekuasaan) negara dan pemerintah, umumnya bermuara pada adanya bukti atau fakta bahwa, penyelenggaraan negara berjalan dengan tertib, aman, sejahtera, dan yang penting tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Walaupun mereka meragukan akan kualitas kepemimpinan umat Islam saat ini; namun santri berharap agar negara dapat menegakkan hukum Islam secara konsisten.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang para santri memiliki kepercayaan pada personil-personil yang jujur dan profesional, yang diharapkan datang dari muslim-muslim yang berkualitas. Selama ini terjadi krisis kepercayaan pada umat Islam sendiri, karena realitas bicara, bahwa, belum tentu panitia pemilu yang muslim, menjadi jaminan pemilu tahun 2004 berjalan tertib, aman, dan sukses. Sumber dan media yang digunakan para santri untuk memperoleh informasi tentang pemilu, pertama saluran televisi, kedua surat kabar, ketiga radio. Adapun saluran komunikasi langsung diperoleh dari guru dan terakhir dari orang tua. Adapun materi (content) informasi yang dibutuhkan santri adalah tentang hak dan Kewajiban sebagai warga negara, termasuk isu hak azasi manusia; kemudian kewajiban pemerintah/pemimpin kepada rakyat dan tentang hukum & demokrasi. Untuk itu media massa merupakan sumber utama dan penting dalam sosialisasi tentang pemilu.

Kata Kunci : Kesadaran Politik, Peran Santri dalam Pemilu

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa kali penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai tahun 1971, 1977, sampai dengan pemilu tahun 2004, umat Islam di Indonesia terutama dari kalangan non elit (*grass root*) umumnya hanya menjadi obyek atau sasaran kampanye partai-partai politik untuk meraih dukungan. Namun setelah pemilu berlangsung dan partai yang dipilih umat Islam menang; mereka diabaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor internal umat Islam sendiri atau faktor-faktor eksternal yang relatif merugikan umat Islam dalam kehidupan bernegara. Faktor internal umat Islam hanya menjadi “kendaraan politik” bagi pihak-pihak yang ingin berkuasa. Yahya Muhaimin dalam tulisannya tentang “Aspek Partisipasi Politik” mengemukakan bahwa :

“Pertama, kebanyakan (*the man on the street*) umat Islam menerima dan mengaku agamanya karena tradisi, yaitu mereka Islam karena orang tuanya Islam. Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia terikat sekali dengan budaya paternalistik atau hubungan *patron client*, hubungan bapak-anak buah. Hal ini menumbuhkan ketaatan yang berlebihan. Termasuk dalam kehidupan di lingkungan pesantren antara kiai-santri (1983 : 200).

Pernyataan di atas jelas mengindikasikan, bahwa umat Islam yang secara kuantitas menempati urutan terbanyak di Indonesia, namun secara kualitas masih jauh dari harapan; termasuk dalam kehidupan politik dan bernegara. Kondisi budaya paternalistik, seringkali membuat para santri patuh tanpa syarat kepada pimpinan pesantrennya. Sebagai kasus, beberapa televisi swasta pada akhir tahun setelah peristiwa bom di Bali, menayangkan beberapa pelaku tersangka teroris, sebagai santri di sebuah pesantren, belajar menggunakan senjata api untuk menyerang lawannya. Padahal secara undang-undang seorang warga negara sipil, tidak boleh memiliki senjata api. Kalangan umat Islam dari pesantren seringkali menempatkan realitas kehidupan bernegara dari sudut pandang tunggal yaitu ajaran Islam, sehingga jika ada kehidupan politik yang berbeda dengan ajaran Islam dengan radikal ingin merubahnya.

Faktor eksternal sebagai pemicu umat Islam terus dieksploitasi, terutama datang dari negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Di samping dieksploitasi sebagai target pasar bagi barang-barang produksi negaranya yang kadang-kadang tidak

Islami (daging, minuman keras, dan makanan haram), juga umat Islam seringkali dipinggirkan dalam kepentingan politik internasional dan dianggap ancaman bagi negara-negara mereka yang dominan beragama Kristen. Hal ini sering direpresentasikan melalui media massa asing yang menganggap umat Islam penuh kekerasan dalam perilaku politiknya, dianggap pesantren tertentu sebagai sarang teroris. Informasi ini sudah tentu sangat menyudutkan umat Islam pada posisi yang negatif.

Di sisi lain, pada kenyataannya kebijakan pemerintah terutama pada era orde baru sering menempatkan kepentingan umat Islam, sebagai golongan minoritas, yang dikalahkan oleh kepentingan penguasa yang mengatasnamakan persatuan dan kesatuan negara. Padahal ada peraturan tentang hak-hak asasi manusia yang dikukuhkan pada TAP MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 bahwa sebagai warga negara di antaranya memperoleh hak keadilan, hak kemerdekaan, hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh informasi (*right to know*), hak kesejahteraan, dan pelayanan publik dari pemerintah. Aturan dan perundangan bahkan kebijakan pemerintah tentang kehidupan politik dan kewarganegaraan (*Civic Society*) memang sudah sering disosialisasikan melalui media massa atau komunikasi tatap muka. Namun apakah pesan-pesan politik ini telah sampai dan dipahami juga oleh para kalangan pesantren? Jika sudah diterima pesan politik tersebut, seperti apakah penerimaan mereka? Bagaimana kepercayaan, nilai dan harapan para santri terhadap kekuasaan formal dan pimpinan negara saat ini, apakah juga mereka memahami atas peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik? Selain itu setiap menjelang pemilu, apakah diperlukan tentang peta pemahaman dan kesadaran para santri tentang kehidupan politik agar tidak menjadi korban politik atau mengorbankan pihak lain. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut dalam suatu penelitian yang dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : **“Bagaimana Peta Kesadaran dan Pemahaman Politik para Santri di Kabupaten Bandung menjelang Pemilu Tahun 2004”?**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan para santri tentang berbagai peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik?
2. Bagaimana pemahaman para santri tentang status dan kedudukannya sebagai umat Islam dan warga negara ?

3. Bagaimana kepercayaan, nilai, dan harapan para santri terhadap politik (kekuasaan)?
4. Bagaimana tingkat pengetahuan dan pengalaman para santri tentang penyelenggaraan pemilihan umum?
5. Bagaimana kepercayaan, nilai, dan harapan para santri tentang penyelenggaraan pemilihan umum?
6. Sumber dan media informasi apa yang digunakan/dimiliki para santri untuk memperoleh informasi tentang pemilihan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data dan informasi tentang tingkat pengetahuan para santri berkenaan dengan peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik.
2. Menghasilkan data dan informasi tentang pemahaman para santri berkenaan dengan status dan kedudukan sebagai umat Islam dan warga negara.
3. Memperoleh data dan informasi tentang kepercayaan, nilai, dan harapan para santri terhadap politik (kekuasaan).
4. Memperoleh data dan informasi tentang tingkat pengetahuan dan pengalaman para santri berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Memperoleh data dan informasi tentang kepercayaan, nilai, dan harapan para santri tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
6. Menghasilkan data dan informasi tentang sumber dan media informasi yang digunakan/dimiliki para santri untuk memperoleh informasi berkenaan dengan pemilihan umum.

1.4 Kerangka Pemikiran

1) Konsep Politik

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat variabel-variabel yang akan dikaji, pertama tentang konsep politik yang dikemukakan Soesanto (1999) bahwa dalam arti sempit, berarti kekuasaan formal dalam suatu negara, yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif; jika mengacu kepada pemerintahan, berarti kewenangan yang dimiliki aparat pemerintah pusat maupun daerah sampai pada tingkat camat dan lurah. Sedangkan dalam arti luas politik berkenaan dengan kehidupan bernegara/hak dan kewajiban seorang warga negara. Untuk itu mengkaji tentang kesadaran dan pemahaman politik, berangkat dari “teori belajar sosial” yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Pada penelitian ini, dikemukakan teori belajar sosial yang sudah dimodifikasi oleh Dan Nimmo sesuai dengan konteks penelitian komunikasi politik.

Mengkaji tentang pemikiran, sikap dan perilaku politik mengacu pada Teori Belajar Sosial yang mengasumsikan : “ Belajar politik adalah proses mengadopsi dan menerapkan politik pada tindakan orang lain yang diharapkan dan berlanjut melalui pengambilan peran dan permainan peran” (Nimmo, 2000 : 106). Selanjutnya karakteristik belajar sosial juga dikaji oleh Nimmo lebih lanjut sebagai berikut :

Belajar politik adalah interpersonal. Aspek ini memperkenalkan peran-peran yang dapat dimainkan oleh seseorang dalam gelanggang politik. Hal ini diperoleh melalui proses belajar dari cara ia memandang dirinya, juga orang lain memandang dirinya. Pengambilan peran adalah kegiatan mental seseorang yang membayangkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan orang lain tentang dirinya, membandingkan kesimpulan itu dengan pendirian sendiri, dan menerapkan perilaku sesuai dengan hal itu. Pengambilan peran memerlukan komunikasi dan sebaliknya.

Belajar politik itu akumulatif. Belajar politik berlangsung secara bertahap, dimulai sejak dini (kanak-kanak) dan berlangsung terus secara akumulatif. Proses tersebut berlangsung melalui asimilasi dan peniruan; ketika ia belum mampu menetapkan pendiriannya, maka ia mulai menggabungkan dengan pandangan dan pendapat orang lain, terus bertahap sehingga ia memiliki peran dan pendirian yang lebih terorganisir dan konsisten.

Belajar politik adoptif. Warga negara yang berpikir dengan diri politik yang berkembang penuh, menerapkan pandangan tentang situasi perubahan dalam lingkungan politik. Perubahan yang diperhitungkan oleh individu menjadi terbuka bagi komunikasi politik. Pada gilirannya, orang juga menerapkan lingkungan politik secara personal.

Berdasarkan karakteristik di atas, maka muncul perkembangan politik dalam diri individu yang berkaitan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Mengungkapkan identitas personal sebagai warga negara yang sesuai atau berbeda pendapat, anggota kelompok, dan atau partai politik, sebagai pemimpin, pengikut, atau bukan pengikut.
- b. Mengevaluasi objek penelitian, menerima atau menolak pemimpin politik, kelompok, partai, kebijakan, dan otoritas.
- c. Memahami bahwa mencapai tujuan nyata dengan cara instrumental dengan mempengaruhi pemerintah adalah yang terbaik (Nimmo 2000 : 107-109).

Selanjutnya diketahui bahwa santri merupakan kelompok masyarakat yang strategis untuk memajukan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Sudah tentu, walaupun Indonesia merupakan negara yang demokratis, seringkali diinterpretasikan dari masa ke masa oleh penguasa negara secara berbeda. Untuk itu, diperlukan persamaan persepsi bagi semua warga negara dari berbagai kelompok atau golongan yang ada di Indonesia. Secara sederhana dengan pendekatan aplikatif. Konsep demokrasi itu sendiri dikemukakan oleh Adam (2000 : 110) sebagai berikut :

Pertama, demokrasi adalah kekuasaan yang terbanyak/mayoritas, walaupun pihak mayoritas harus mencari kompromi dan mempertimbangkan kebutuhan minoritas; Kedua, demokrasi berarti kekuasaan di tangan hukum, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum; Ketiga, demokrasi tidak mungkin tanpa toleransi terhadap berbagai pendapat. Konflik tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara kekerasan, tapi dengan dialog; Keempat, pemilu adalah tanda-tanda demokrasi walaupun bukan yang utama.

Dengan berdasarkan konsep-konsep demokrasi di atas, sebetulnya jika dipahami oleh semua pihak dengan benar, tidak mungkin terjadi memaksakan kehendak, tindakan kekerasan, atau pemberlakuan “hukum rimba” misalnya, dalam kampanye pemilihan umum. Diakui oleh banyak

pihak dan juga didukung oleh hasil penelitian, bahwa : pendidikan dan komunikasi politik di Indonesia belum berjalan secara optimal. Baik di tingkat elit politik seperti kurangnya dialog di antara tokoh-tokoh partai, masyarakat dan tokoh pemerintahan; maupun di kalangan masyarakat awam, masih jauh untuk memahami dan mendekati permasalahan politik dengan arif dan rasional, namun lebih banyak bersifat emosional (LIN, 2001 : 196).

Untuk itu, sosialisasi pesan politik dan bernegara perlu diprogramkan secara efektif dan efisien, termasuk pada para santri di pesantren-pesantren. Seperti telah dikemukakan bahwa memahami peta kesadaran politik berarti membangun kualitas para santri di bidang politik dan bernegara. Di bidang politik berarti mereka memahami dan menyadari di antaranya : *Pertama*, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk memilih pemimpin negara dan bangsanya; *Kedua*, memahami peraturan/aturan main, etika untuk memperoleh kekuasaan; *Ketiga*, menyampaikan pendapat, aspirasi, kritikan dan ketidak puasan melalui saluran dan cara yang telah disepakati bersama sambil tidak melepaskan dari nilai-nilai etika. Adapun sebagai warga negara berarti memahami dan menyadari antara lain, *pertama* : mengikuti hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. *kedua* : menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara; *ketiga* : memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

Untuk itu, teori dari Huntington (1980) dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini terutama untuk membangun pemahaman dan kesadaran politik dan bernegara bagi masyarakat yang berada di negara yang sedang berkembang. Huntington membedakan pembangunan demokrasi dari 2 (dua) faktor, yaitu :

- a. Pra kondisi demokrasi yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi;
- b. Proses politik yang diperlukan untuk pembangunan demokrasi.

Analisis yang lebih canggih dari Huntington setelah 20 tahun penelitian, bahwa selain faktor kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan, terdapat beberapa faktor lain untuk menuju proses demokratisasi, yaitu : struktur sosial, lingkungan eksternal dan konteks budaya. Berikut dipaparkan predisposisinya : *Pertama*, semakin makmur suatu negara secara ekonomis, semakin memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi negara demokratis. Hal ini bisa dianalogikan pada suatu komunitas, berlaku sama; *Kedua*, jika tersedia struktur sosial yang artikulatif dan tersebar merata secara luas serta tersedia berbagai kelompok secara relatif otonom

(kelompok, usahawan, profesi, agama, dan etnis), maka kelompok-kelompok ini akan mendorong timbulnya basis yang diperlukan untuk mengendalikan kekuasaan negara dan membangun prasarana dasar yang diperlukan untuk tumbuhnya pranata demokrasi. Jika hal yang sebaliknya terjadi, maka masyarakat cenderung didominasi oleh satu model kekuasaan yang terpusat; *Ketiga*, demokratisasi lebih merupakan hasil proses difusi dibanding sebagai akibat pembangunan. Pengaruh lingkungan internasional seperti Inggris dan Amerika Serikat yang menjalankan usaha-usaha untuk mempengaruhi proses politik di negara lain, secara tidak langsung menyediakan model-model negara demokrasi yang tangguh; *Keempat*, Huntington menguji hubungan antara agama dengan budaya politik, hasilnya dianggap bahwa agama Protestan memiliki korelasi yang tinggi dengan demokrasi, sementara Islam, Konfusianisme, Budhisme menyiapkan ladang subur untuk tumbuhnya pemerintahan otoriter (Huntington, dalam Suwarsono & Y. So, 1994 : 79-80).

2) Santri dan Kehidupan Pesantren

Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, dimana kiai, ustadz, santri, dan pengurus pesantren, hidup bersama dalam satu kampus, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum yang mengitarinya. Ia merupakan suatu keluarga besar di bawah asuhan seorang kiai atau ulama, dibantu oleh beberapa kiai dan ustadz. Dalam dunia pesantren, santri mempunyai dua orang tua, yaitu ibu-bapak yang melahirkan dan kiai yang mengasuhnya. Ia juga mempunyai dua saudara, yaitu saudara sesusuan dan saudara sepeguruan (sesama santri).

Sementara itu, motivasi pertama orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren, agar anaknya menjadi orang baik, dihormati, disegani dalam hidup bermasyarakat, dan taat menjalankan perintah agama. Pada dasarnya motivasi tetap masih ada pada mereka. Namun demikian, akhir-akhir ini juga terdapat alasan lain dari orang tua mengirimkan anaknya belajar ke pesantren, yaitu biaya relatif murah dibandingkan dengan sekolah lain dan dilihat dari kepentingan anak didik mereka juga memperoleh kesempatan mendapatkan ijazah negeri melalui jalur pendidikan formal, yaitu : madrasah atau sekolah umum yang diselenggarakan oleh pesantren. Dengan demikian, ada 3 alasan mengapa mereka mengirimkan anaknya ke pesantren, yaitu : *pertama*, belajar agama; *kedua*, kesempatan terbuka untuk memperoleh ijazah negeri; dan *ketiga*, biaya relatif murah.

3) Pandangan Islam tentang Kehidupan Bernegara.

Kata Islam dipakai dalam tiga arti, yaitu : *agama*, *negara*, dan *kultur*. Islam sebagai agama adalah suatu sistem kepercayaan dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diwahyukan dalam al-Qur'an dan dilengkapi oleh hadits. Islam sebagai negara adalah kesatuan politik berdasarkan hukum al-Qur'an, dikembangkan oleh para pengganti Nabi Muhammad – Khulafa al-Rasyidin – dan belakangan pecah dalam beberapa negara. Kultur Islam memperlihatkan, bahwa perpaduan peradaban tingkat tinggi, diperkaya dengan semit, Persia, Greko-Romawi, dan lain sebagainya, dikembangkan pada masa *daulah* dan terutama yang lahir dengan perantaraan bahasa Arab. Persoalan Islam sebagai suatu sistem ketatanegaraan, tidak terlepas dari berbagai persoalannya, seperti persoalan hubungan antara Islam dan negara (politik). Dalam ajaran Islam tidak memisahkan antara persoalan duniawi dan ukhrawi, tetapi dalam prakteknya tidaklah sesederhana itu.

Negara-negara yang mengatasnamakan Islam atau penduduknya mayoritas Islam mempunyai problem yang sama, mereka belum mampu merumuskan dengan jelas dan menyelesaikan persoalan hubungan antara agama dan negara. Bahkan persoalan ini menjadi fokus perdebatan di kalangan politisi dan cendekiawan muslim.

Dengan kata lain, jika manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu “pendelegasian kewenangan” (*delegation of authority*) dari Allah Swt, karena Dia adalah Sumber dari segala kekuasaan. Sebagai Pemilik Penguasa mutlak, Allah dapat melimpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, demikian pula Allah dapat mengambil kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah dan bersifat nisbi (relatif) serta temporer yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Dengan demikian, makna kekuasaan menurut ajaran Islam adalah “kewajiban dan kewenangan (otoritas)”. Kekuasaan menjadi salah satu prinsip umum *siyasah diniyah* yang harus diimplementasikan bersama 8 prinsip umum lainnya secara integral dan utuh. Karenanya, kewajiban (menyampaikan amanah) harus didahulukan dari kewenangan (sebagai hak-hak penguasa).

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk pendekatan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau *in depth interview*, angket, teknik observasi/pengamatan, dan literatur/kepuustakaan

Populasi ini menetapkan para santri di dua kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Pacet. Adapun sebagai sampel responden, digunakan teknik random sampling, karena peneliti memiliki kerangka sampling yang ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah populasi (Suharsimi Arikunto, 1993 : 107) dari kedua pesantren di kecamatan itu sebanyak 440 orang, sehingga diperoleh sampel sebanyak 88 orang santri sebagai responden. Pesantren yang menjadi sampel, yaitu Yayasan Pesantren Islam (YPI) Cikoneng, Kecamatan Ciparay, dan Pesantren Modern Mathla'ul Huda (PMMH) Manggahang, Kecamatan Bale Endah.

2. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pendekatan data kuantitatif, hasil penelitian ini sistimatikanya terbagi pada 5 aspek sesuai dengan pertanyaan penelitian.

1) Tingkat Pengetahuan Santri tentang Politik

Sebagai siswa, santri pernah memperoleh pelajaran Kewarganegaraan/PPKN, namun ketika difokuskan tentang informasi peraturan atau UU yang berkaitan dengan politik, masih sekitar 13% tidak tahu. Lebih lanjut ketika santri diminta secara spontan untuk menceritakan tentang peraturan pemilu, partai politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan awal mereka apalagi pemahaman masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena sumber dan saluran informasi tentang hal tersebut masih sangat kurang. Pendidikan politik melalui media massa ketika itu sangat terbatas. Pada kenyataannya ada anggapan bagi para remaja ini, bahwa masalah politik dianggap sulit dan hanya untuk urusan orang tua. Informasi tentang hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara merupakan “modal awal” untuk lebih menggali kesadaran responden tentang kehidupan politik secara luas. Ketika ditelusuri apa hak dan kewajiban warga negara, santri menyebutnya, hak untuk mendapat perlindungan, pendidikan, HAM, hak untuk berpendapat dan bayar pajak.

2) Pemahaman Santri tentang Status dan Kedudukannya sebagai Muslim

Santri menyadari bahwa ia memiliki 2 (dua) status atau kedudukan, pertama sebagai muslim, 100% santri setuju bahwa pemimpin negara harus Islam, namun sebagai warga negara yang menyadari kemajemukan Indonesia, ada sekitar 30% santri yang menyatakan ragu-ragu pemimpin harus Islam. Di sini ada keraguan santri. Dari perspektif pengembangan kualitas beragama (Islam) merupakan hal yang memprihatinkan bila santri seolah memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama. Karena seharusnya iman dalam Islam memandu seseorang untuk menjalani kehidupan duniawinya secara konsisten. Gejala ini merupakan indikasi, munculnya “tekanan” melalui informasi tentang fanatisme, radikalisme, ekstrim kanan, terorisme, dll. Alternatif lain, belum komprehensifnya pemahaman para santri dalam mensintesis realitas kehidupan yang dihadapinya sesuai dengan Al-Quran & Hadist.

Sebagian besar (65,11%) responden sebagai umat Islam tidak setuju mengikuti undang-undang atau aturan negara yang berbeda dengan hukum Islam. Sebagian kecil (34,69%) sebagai umat Islam ragu-ragu mengikuti undang-undang atau aturan negara yang berbeda dengan hukum Islam, dan (10,20%) sebagai umat Islam setuju mengikuti undang-undang atau aturan negara yang berbeda dengan hukum Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, umumnya, para santri konsisten dengan ajaran Islam, artinya tidak ada perbedaan antara kehidupan beragama dengan bernegara. Harapan mereka bahwa undang-undang atau peraturan negara, harus sejalan dengan aturan Islam dapat dipahami; mengingat ada pernyataan sosiolog Greetz, bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari kelompok Islam abangan, santri dan priyayi; dimana di sana menggambarkan berbagai kualitas umat Islam yang berada di Indonesia. Masing-masing kelompok tersebut memiliki parameter-parameter tertentu, seperti Islam abangan merujuk orang yang mengaku Islam, tapi tidak menjalankan salat, shaum, atau zakat; kelompok santri merujuk pada orang yang taat menjalankan syariat Islam dll. Kondisi tersebut mempengaruhi konsistensi antara keyakinannya terhadap agama Islam dengan perkataan dan perilakunya; semakin dia konsisten dengan Al-Quran dan Hadist, maka semakin dia tidak mau menerima ketentuan di luar itu. Namun ada pula karena penafsiran dan persepsi yang tidak sama terhadap

ajaran Islam, sehingga dapat menimbulkan sikap menolak ajaran di luar Islam secara ekstrim.

Jika melihat sejarah berdiri negara Indonesia yang dibidani oleh umat Islam, maka kelihatannya tidak mungkin ada perbedaan antara aturan negara dengan ajaran agama Islam. Namun mengingat negara kesatuan ini semakin berkembang dan harus mengakui kemajemukan masyarakatnya, terutama dalam kehidupan beragama, maka mungkin saja aturan negara ada yang tidak 'sejalan' dengan ajaran agama Islam.

Di sisi lain masih ada responden yang tidak setuju atau ragu-ragu, jika negara Indonesia menggunakan hukum Islam, oleh karena pemahaman dan pengalaman yang dimilikinya selama ini menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam seperti negara Saudi Arabia, sehingga sikap ini mencerminkan kepatuhan santri sebagai seorang warganegara yang hidup di Indonesia.

3) Kepercayaan, Nilai, dan Harapan Santri terhadap Politik (Kekuasaan)

Data responden ditinjau dari pertanyaan penelitian tentang kepercayaan, nilai, dan harapan terhadap politik (kekuasaan) diukur melalui bentuk '*statement*' atau pernyataan, bukan pertanyaan tentang kepercayaan, penilaian, dan harapan responden terhadap kehidupan politik dan kepemimpinan (kekuasaan negara). Berikut diuraikan deskripsi dan analisisnya.

Lebih dari setengah (53,07%) responden setuju jika kekuasaan negara dipegang oleh umat Islam negara akan tertib, aman, dan sejahtera. Sebagian kecil (38,77%) ragu-ragu jika kekuasaan negara dipegang oleh umat Islam negara akan tertib, aman, dan sejahtera. Sedikit sekali (8,16 %) tidak setuju jika kekuasaan negara dipegang oleh umat Islam negara akan tertib, aman, dan sejahtera. Sebagian besar (66,67 %) responden PMMH setuju jika kekuasaan negara dipegang oleh umat Islam negara akan tertib, aman, dan sejahtera. Sebagian kecil (33,33%) tidak setuju jika kekuasaan negara dipegang oleh umat Islam negara akan tertib, aman, dan sejahtera.

Hampir seluruhnya (93,88%) responden setuju negara menegakkan hukum Islam secara utuh. Sedikit sekali (6,12%) ragu-ragu negara menegakkan hukum Islam secara utuh. Dari ketiga pernyataan di atas, yang diajukan pada responden, ternyata ada keterkaitan satu sama lain, pertama,

mereka menilai umat Islam yang saat ini sedang memegang kekuasaan, tidak semuanya bahkan banyak yang tidak memegang amanah sebagai pemimpin. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperolehnya melalui media massa maupun obrolan-obrolan secara langsung dengan lingkungannya, mengenai ketidakjujuran pejabat (merebaknya penggunaan *money politic* pada pemilihan bupati di tahun 2003), penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang (beberapa pemda kabupaten dan Kota mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah karena ada UU Otonomi Daerah), mencuri uang rakyat (disinyalir lebih dari 30% kebocoran uang negara), atau mengeluarkan kebijakan publik yang merugikan rakyat (berita Televisi, Radio, dan Surat Kabar, 2003). Untuk itu, ketika diberikan pernyataan bahwa kondisi ini terjadi karena mungkin dipegang oleh umat non muslim, responden ragu-ragu bahkan menolak *statement* tersebut.

Harapannya, jika memang umat Islam konsisten dengan ajarannya, bahwa : yang mencuri dipotong tangan, atau membunuh dihukum mati; maka negara ini akan lebih aman, tertib, dan sejahtera. Saat ini memang secara umum, bangsa Indonesia sedang mengalami multi krisis, termasuk krisis di bidang penegakkan hukum. Hukum-hukum yang ada pada prakteknya direkayasa sehingga hanya berlaku untuk rakyat kecil sedangkan pejabat negara, pengusaha kakap, atau tokoh masyarakat yang punya kekuatan dan kekuasaan, seolah nyaris tidak tersentuh hukum. Untuk itu responden percaya dan berharap negara bisa menjalankan hukum Islam secara utuh; untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.

Suara santri yang menyerukan kepercayaan, penilaian, dan harapannya, memang berangkat dari komunitas Islam yang di Indonesia ini merupakan mayoritas atau sekitar 90% dari jumlah penduduknya; namun pada kenyataannya sering terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara adidaya, terutama di bidang ekonomi dan politik. Untuk itu, perjuangan-perjuangan umat Islam secara politis terus bergulir. Namun yang mengherankan, walaupun pimpinan tertinggi negara di pegang oleh muslim, tetap mereka belum memenuhi harapan dan kepercayaan para responden, dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada muslim.

4) Tingkat Pengetahuan dan Pengalaman Pemilihan Umum

Data responden ditinjau dari pertanyaan penelitian tingkat pengetahuan dan pengalaman Pemilihan Umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Lebih dari setengah (57,14%) responden setuju menyaksikan kampanye pemilu periode tahun 1999, sebagian kecil (30,61%) ragu-ragu menyaksikan kampanye pemilu periode tahun 1999, dan (12,24 %) tidak setuju menyaksikan kampanye pemilu periode tahun 1999. Untuk itu, sebagian menyatakan ragu-ragu atau belum pernah mengalami masa kampanye. Sebaliknya, masih lebih banyak responden yang menyaksikan atau mengalami kampanye pada pemilu, oleh karena mereka ketika itu sudah memasuki usia remaja, yang sudah mulai paham tentang politik; bahkan mungkin sudah berusia 17 tahun sehingga memiliki hak pilih. Semua pengalaman responden ini merupakan sumber pengetahuan mereka tentang dunia politik di Indonesia. Melalui pengalaman manusia yang disensasinya, biasanya akan membentuk persepsi, sikap sampai pada perilaku selanjutnya. Untuk itu pengalaman yang bersifat 'ekstrim' baik pahit/negatif maupun positif, akan berkesan dan tertanam sangat lama pada jiwa manusia.

Kondisi ini menurut Nimmo (2000 : 129) bahwa, "warga negara ada yang mencari informasi dan peristiwa politik secara sengaja dan yang tidak sengaja. Mereka yang sengaja karena untuk mencapai tujuan tertentu seperti mempengaruhi anggota legislatif, mengarahkan kebijakan pemerintah dll. Adapun yang melakukan kegiatan politik secara kebetulan adalah mereka yang menemukan stiker kampanye, mendengar cerita politik, dll".

Tahun 1999 dunia perpolitikan Indonesia sedang mengalami 'euforia' dalam arti, ketika itu baru bergulirnya era reformasi dan kejatuhan era orde baru di tahun 1998. Suasana 'bulan madu' dengan kebebasan menyatakan pendapat atau semangat membangun demokrasi sangat tinggi. Suasana tersebut tercermin pula pada suasana kampanye yang relatif lebih bebas; seperti penguasaan jalan raya oleh partai dan simpatisannya, sehingga simbol warna yang berbeda saja, dapat menimbulkan konflik fisik. Propaganda dan orasi para ketua partai yang seringkali keluar dari ketentuan; termasuk dari kalangan pesantren dan Ormas Islam lainnya. Kondisi pemilu seperti demikianlah yang diterima oleh responden sebagai pengetahuan pertamanya. Untuk itu, pemahaman secara komprehensif, akan tergantung pada pengetahuan yang diterima selanjutnya.

Sebagian besar (77,56%) responden sebagai umat Islam setuju partai-partai di negara yang mayoritas beragama Islam harus partai Islam, sebagian kecil (14,28%) sebagai umat Islam ragu-ragu partai-partai di negara yang mayoritas beragama Islam harus partai Islam, dan sedikit sekali (8,16%) sebagai umat Islam tidak setuju partai-partai di negara yang mayoritas beragama Islam harus partai Islam.

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa, ada (2) dua kelompok muslim yang berpandangan berbeda dengan partai Islam. *Pertama* mereka berpendapat bahwa partai Islam adalah suatu partai yang memiliki misi dan visi Islam secara *kaffah* (utuh); berarti atribut dan simbol-simbol Islam harus melekat atau digunakan secara lengkap pada partai tersebut. *Kedua*, kelompok yang berpendapat partai Islam adalah partai yang misi dan visinya agama Islam, namun tidak perlu menggunakan simbol-simbol Islam seperti warna hijau, huruf Arab, atau artifak lain yang bermuara pada negara Timur Tengah. Untuk itu, walaupun dalam pernyataan responden setuju dengan partai Islam; tapi untuk partai non Islam banyak juga yang setuju pula. Artinya, responden belum ada kesepahaman mengenai partai Islam yang dimaksud; namun yang pasti mereka akan setuju bahwa, visi dan misi yang Islami harus dilaksanakan secara konsisten, bukan sekedar ucapan atau simbol-simbol saja.

5) Kepercayaan, Nilai, dan Harapan Pemilihan Umum

Lebih dari setengahnya (51,03%) responden ragu-ragu jika panitia pemilu di pegang oleh umat Islam pemilu tahun 2004 akan berjalan tertib, aman, dan sukses. Sebagian kecil (38,77%) setuju jika panitia pemilu di pegang oleh umat Islam pemilu tahun 2004 akan berjalan tertib, aman, dan sukses, dan (10,20%) tidak setuju jika panitia pemilu di pegang oleh umat Islam pemilu tahun 2004 akan berjalan tertib, aman, dan sukses.

Ternyata temuan penelitian menunjukkan bahwa responden masih banyak yang meragukan keprofesionalan muslim sebagai pengelola pemilu di tahun 2004. Mengapa ? Pertama, Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sangat rendah, karena keterbukaan informasi saat ini, membuka kekurangan, kelemahan, ketidakjujuran mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Alasan lain bahwa masyarakat semakin cerdas dan tidak bisa dibodohi begitu saja dengan pernyataan-pernyataan yang berupa 'kebohongan publik'; oleh karena media massa membantu mengungkap kebenaran atau realitas

yang sesungguhnya. Ketiga, pemimpin Islam yang sedang berkuasa sekarang, tidak merepresentasikan kepentingan umat Islam, sehingga timbul ketidakpercayaan muslim pada pemimpin tersebut. Banyak tokoh masyarakat seperti Nurcholis Majid berpendapat bahwa, 'kita saat ini tidak punya pimpinan yang patut diteladani'. Padahal, berdasarkan pendekatan sosial budaya, bangsa Indonesia masih menganut sistem paternalistik yang kuat; dimana kharismatik dan keteladanan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam diri seorang pemimpin.

Selanjutnya, secara spesifik penilaian tentang kepemimpinan Islam dinyatakan oleh responden berikut ini. Hampir setengahnya (42,87%) responden ragu-ragu pemilu di negara ini selalu mengandung konflik dan perpecahan karena banyak pimpinan partai yang non muslim. Sebagian kecil (34,69%) setuju pemilu di negara ini selalu mengandung konflik dan perpecahan karena banyak pimpinan partai yang non muslim, dan (22,44%) tidak setuju pemilu di negara ini selalu mengandung konflik dan perpecahan karena banyak pimpinan partai yang non Muslim.

Data penelitian ini, kembali memperkuat tentang sikap responden akan kepemimpinan negara. Umumnya mereka ragu-ragu bahkan tidak setuju bahwa konflik dan kekacauan negara disebabkan karena pemimpin non muslim. Oleh karena mereka melihat realitanya, bahwa saat ini lebih banyak pemimpin negara yang muslim dari pada yang non muslim; namun konflik dan KKN jalan terus. Artinya, penilaian responden terhadap pemimpin negara atau yang sedang memegang kekuasaan saat ini kurang baik atau bersifat negatif. Sehingga harapan mereka, pemimpin tersebut sadar bahwa jika mereka berbuat kesalahan dan kekeliruan, maka yang terkena dampaknya adalah citra umat Islam yang secara keseluruhan akan dianggap negatif pula.

6) Sumber dan Media Informasi Pemilu

Sistem pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2004 ini memiliki perbedaan dengan sistem pemilu tahun 1999; dimana salah satunya, para partai peserta pemilu menyertakan daftar nama calon legislatifnya, sehingga selain memilih tanda gambar partai, juga pemilih akan memilih nama orang secara langsung. Untuk itu pengetahuan, pemahaman responden, sampai pada kesadaran tentang politik yang terbentuk dari berbagai informasi yang diterimanya; akan sangat tergantung pada sumber-sumber dan media informasi yang digunakannya

Hampir setengahnya (45,28%) responden memperoleh informasi tentang pemilu melalui TV & Radio, sebagian kecil (24,48%) memperoleh informasi tentang pemilu dari guru, 20,04% memperoleh informasi tentang pemilu melalui koran & majalah, dan 10,20% memperoleh informasi tentang pemilu dari orang tua.

Televisi saat ini memang merupakan media massa elektronik yang menjadi '*trend setter*' bagi masyarakat, terutama dalam dunia hiburan dan informasi; oleh karena kekuatannya pada gambar yang bergerak dan dapat direkayasa. Sedangkan surat kabar juga menjadi sumber informasi responden pada urutan kedua, karena kekuatannya pada daya analisis dari sebuah peristiwa, sehingga informasi yang diberikan lebih lengkap dan komprehensif. Namun dari jenis-jenis media massa tersebut, masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Untuk itu bagi audiens tertentu, selain menonton televisi dia juga membaca surat kabar untuk informasi yang sama; sebagai pelengkap atau konfirmasi.

Lebih dari setengah (51,03%) responden memerlukan informasi untuk pengetahuan dalam kehidupan bernegara tentang HAM, hak & kewajiban WNI/WNA, sebagian kecil (30,59%) memerlukan informasi untuk pengetahuan dalam kehidupan bernegara tentang kewajiban pemerintah/ pemimpin kepada rakyat, dan (18,38%) memerlukan informasi untuk pengetahuan dalam kehidupan bernegara tentang hukum, dan demokrasi. Data penelitian di atas menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan responden terpenting adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kedua terpenting adalah kewajiban pemerintah/Pemimpin pada rakyatnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Nimmo (2000 : 8) bahwa, "Politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial". Artinya jelas, bahwa posisi responden sebagai warga negara dengan pemimpin pemerintahan, merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan berseberangan. Rakyat ingin memperoleh hak-haknya secara penuh seperti kesejahteraan, pendidikan, keamanan, kesehatan, mata pencaharian yang baik, jika itu tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka ia akan menuntut haknya tersebut. Sebaliknya tuntutan pemerintah terhadap rakyatnya adalah membayar pajak, atau retribusi, taat aturan, menjaga keamanan, ketertiban dan tuntutan lainnya. Untuk itu jika kondisi ini tidak dituangkan dalam kesepakatan dan ikatan bersama, maka akan timbul konflik-konflik yang berkepanjangan. Selama ini

informasi tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat; diduga kurang disosialisasikan melalui media massa. Untuk itu perlu ditinjau kembali tentang peranan media massa sebagai pendidik masyarakat untuk ditingkatkan.

3. Kesimpulan & Saran

3.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik ada pada kategori sedang dan rendah. Dalam arti mereka memahami sebatas aturan dan kebijakan pemerintah yang aplikatif berkaitan dengan dirinya sebagai anggota masyarakat dan umat Islam. Adapun untuk peraturan tingkat pusat atau di bidang yang tidak terkait langsung, kurang memahaminya, walaupun sekedar pengetahuan selintas mereka memilikinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpolitikan yang dimiliki para santri ternyata informasi politik yang sering dimunculkan oleh media massa.
2. Pemahaman para santri tentang status dan kedudukan, baik sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang bukan negara Islam, berdasarkan penelitian sebagian merasa mantap dan tidak menganggap ada hal yang kontroversial, artinya santri memahami ajaran agama Islam dan menggabungkannya dengan pemahaman tentang peraturan negara, yang keduanya bersifat ‘terbuka’ dalam penafsiran dan pelaksanaannya.
3. Kepercayaan, nilai, dan harapan para santri tentang politik (kekuasaan) negara dan pemerintah, umumnya bermuara pada adanya bukti atau fakta bahwa, penyelenggaraan negara berjalan dengan tertib, aman sejahtera, dan yang penting tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Walaupun mereka meragukan akan kualitas kepemimpinan umat Islam saat ini; namun santri berharap agar negara dapat menegakkan hukum Islam secara konsisten.
4. Dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang para santri memiliki kepercayaan pada personil-personil yang jujur dan profesional yang diharapkan datang dari muslim-muslim yang berkualitas

5. Sumber dan media yang digunakan para santri untuk memperoleh informasi tentang pemilu, adalah : televisi, surat kabar, dan radio. Saluran komunikasi langsung diperoleh dari guru, dan orang tua. Adapun informasi yang dibutuhkan santri tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak azasi manusia, dan kewajiban pemerintah/pemimpin kepada rakyat, hukum, & demokrasi.

3.2 Saran-saran

1. Bagi para pengelola pesantren termasuk para guru pesantren, disarankan untuk memberikan materi-materi pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, baik dari perspektif Islam maupun dari perspektif ilmu umum yang lebih tinggi baik secara kuantitas dan kualitas, juga diberikan pengalaman berorganisasi.
2. Selain materi tentang kehidupan bernegara dan politik ditingkatkan, juga sebaiknya digunakan metode interaktif, untuk menghilangkan keraguan dan untuk memantapkan sikap santri, terutama untuk masalah-masalah yang sifatnya kontroversial atau dilematis.
3. Bagi lembaga pengelola informasi dan komunikasi yang terkait dengan pembinaan para santri, swasta maupun pemerintah, hendaknya memanfaatkan saluran media massa untuk membina kesadaran para santri tentang politik dan pemilu tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Krech, Crutchfield & Ballachey. 1962. *Individual In Society*. Berkeley. USA : University of California.
- Muhaimin, Yahya. 1983 dalam tulisannya tentang “*Aspek Partisipasi Politik*”
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi politik, Khalayak, Pesan dan Media*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- . 2000. *Komunikasi politik, Khalayak dan Efek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rainer, Adam. 2000. *Politik dan Radio, Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*. Hutington. dalam Suwarsono & Y. So. 1994. *Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Soesanto, Astrid.dkk. 1999. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- Tehrani, Majid. 1990. “Teknologi Demokrasi dan Pembangunan”. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)*, vol I/Juli 1998. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.